

PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN

(Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :
RENDY ADITYA PECHLER
NPM. 0771010123**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan nama Allah yang maha dan maha penyayang

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan pengorbanan yang cukup besar. Proposal skripsi ini diambil dengan judul: **"Pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan pada produk makanan dalam kemasan (studi kasus sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony) ."**

Adapun penyusunan skripsi ini yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademis di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dukungan, dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Paidi Pawiro Rejo selaku Direktur Utama Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Surabaya.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh Pegawai Staff Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Surabaya (Bp. Vijay, Bu Ambar, Mb’ yanti, Mas A’an) dan yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu-persatu, atas kerjasamanya dan kesabarannya dalam membantu penyelesaian skripsi ini
10. Kedua orang tua tercinta, Papa, Mama, Mamak, Bunda, adik-adik, kakak-kakak, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan sependeritaan, Yudha, Wimar, Koko, Adit dan serta seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.

12. Ayoe Agoestine selaku Tunanganku tersayang yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. I LOVE YOU ALL....

Penyusun menyadari bahwa ibarat "Tiada Gading yang Tak Retak", maka penyusun dengan segala kekurangannya akan merasa senang apabila terdapat kritik maupun saran yang ditujukan guna perbaikan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang berharga dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu terutama dalam bidang Ilmu Hukum serta tegaknya hukum di Indonesia. Dan dapat bermanfaat bagi pembacanya terutama kalangan hukum dan adik-adik kelas yang ada di fakultas hukum UPN "veteran" Jatim.

Surabaya, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN REVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.5.1. Pengertian Pelanggaran.....	6
1.5.2. Pengertian Hak	6
1.5.3. Tinjauan mengenai Konsumen	7
a. Pengertian Konsumen	7
b. Kewajiban Konsumen	8
c. Hak-Hak Konsumen	9
1.5.4. Pengertian Pelaku Usaha	12
a. Kewajiban Pelaku usaha	13

b. Hak-hak Pelaku usaha	14
c. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha	14
d. Tanggung Jawab Pelaku usaha	16
1.5.5. Cacat Produk	16
1.5.6. Tanggung Jawab Produk	18
1.5.7. Pengertian Alat Ukur Timbangan	22
1.5.8. Pengertian upaya hukum	22
a. Upaya hukum dalam UUPK	22
b. Upaya hukum dalam KUHPerdara	23
c. Upaya hukum dalam UU No.2 tahun 1981	24
1.5.7. Bentuk sanksi-sanksi	24
a. Sanksi-sanksi menurut UUPK	24
b. Sanksi-sanksi menurut KUHPerdara	25
c. Sanksi-sanksi menurut KUHPidana	25
d. Sanksi-sanksi menurut UU no.2 tahun 1981	26
1.6. Metode Penelitian	26
1.6.1. Jenis penelitian dan tipe penelitian	26
1.6.2. Sumber Data	26
1.6.3. Pembatasan masalah	27
1.6.4. Metode pengumpulan data dan pengolahan data	28
1.6.5. Metode analisis data	28
1.6.6. Sistematika penulisan	29
1.7. Lokasi Penelitian	30

BAB II UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA

2.1. Upaya Hukum Sengketa Konsumen dalam Kasus Pengurangan Berat Bersih	35
2.1.1. Penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi)	35
2.1.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan Umum (Litigasi)	40
2.2. Analisa Kasus Sengketa Ibu Fony dengan Toko Hokky Surabaya	44

BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN

3.1. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab	50
3.1.1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan	51
3.1.2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab	51
3.1.3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab	52
3.1.4. Prinsip Taggung Jawab Mutlak	52
3.1.5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan	52
3.2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha	53
3.3. Analisa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen (Studi Kasus Sengketa Ibu Fony dengan Toko Hokky Surabaya)	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Rendy Aditya Pechler
NPM : 0771010123
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 04 November 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU
USAHA DALAM PENGURANGAN BERAT BERSIH
TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM
KEMASAN**

(Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony)

ABSTRAKSI

Konsumen selain dilindungi dengan kebijakan hukum juga harus dilindungi dengan kebijakan untuk meminimalisasi resiko yang harus ditanggung konsumen. Yaitu dengan mencegah beredarnya produk cacat terutama dalam pencantuman label berat bersih di pasar . Banyak produk-produk cacat terutama dalam ketentuan berat bersih timbangan yang beredar di masyarakat, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan tidak diatur secara tegas. Masalah yang akan diteliti meliputi, bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengurangan timbangan makanan dalam kemasan ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pengurangan berat bersih timbangan makanan tersebut.

Dalam melakukan penulisan ini digunakan metode penelitian normatif yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil analisis penelitian, disimpulkan bahwa sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan dapat dilakukan semua konsumen bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat melalui gugatan legal standing. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui jalur Litigasi maupun non litigasi. Dan disini juga dibahas tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban.

Saran dalam penelitian ini adalah agar para konsumen lebih teliti dalam membeli suatu produk dan agar para pelaku usaha lebih beritikad baik dalam menjual produknya.

Kata Kunci : Pelanggaran Hukum, Kecurangan pada Timbangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha diharapkan mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat memberikan kepastian hukum atas barang dan/ jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan adanya kerugian terhadap konsumen.

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang perekonomian antara lain untuk menaikkan harga barang-barang pokok, tarif listrik, tarif air dan sebagainya, kebijakan ini memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha sehingga memicu para pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin tanpa memperhatikan lagi salah satu asas pembangunan nasional yaitu kesadaran hukum dimana tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum.

Dan salah satu caranya adalah berbuat curang dengan memanipulasi timbangan yang mereka gunakan dalam berdagang dan dengan begitu maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih meningkat dan sebaliknya konsumen akan merasa sangat dirugikan dengan hal

tersebut. Padahal barang yang menjadi obyek jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya.¹ Dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPK) yang terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa :

- **Kewajiban Pelaku Usaha**

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berlakunya UUPK bukan untuk memberikan batasan usaha bagi para pelaku usaha akan tetapi, justru sebaliknya perlindungan konsumen untuk dapat mendorong terciptanya iklim berusaha yang sehat dan jujur.

Adanya kewajiban bagi para pelaku usaha sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen, selain dalam Pasal 4 UUPK yang

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1979, cetakan III, hal. 14.

memberikan hak-hak bagi konsumen.

Namun banyak konsumen yang masih tidak sadar akan hal ini bahwa hak-hak mereka telah dilanggar, khususnya pada angka 2,3,7 dan 8.²

Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi telah diatur bahwa alat ukur apapun harus dilakukan kalibrasi dalam setahun sekali. Kalibrasi adalah merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK dan Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi dapat dikenakan sanksi pidana , yang dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 378 :

”Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pelaku usaha yang melanggar hukum-hukum perikatan, karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan merupakan kesengajaan alias cacad kehendak yang mengndung unsur kesesatan, paksaan dan penipuan.³

² Wawancara dengan Victor djarot dewan pengawas Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, senin, 7 januari 2011, pukul 09.30 WIB .

Pelaku usaha seharusnya juga memahami norma-norma yang ada dalam masyarakat agar tidak saling bertabrakan kepentingan dan saling merugikan. Karena pada hakekatnya, masyarakat dalam kehidupannya terikat oleh norma-norma. Adapun substansi yang terkandung dalam norma-norma adalah sebagai berikut :⁴

1. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.
2. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain adalah Penipuan Promo iklan, pemalsuan label halal dan kecurangan berat bersih timbangan. Pelaku usaha yang telah melakukan pengurangan berat bersih pada timbangan makanan sangat merugikan konsumen karena perbuatan tersebut telah melanggar kewajiban pelaku usaha sehingga mengakibatkan hak-hak konsumen menjadi terabaikan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

³ Soetojo prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya PT. Bina Ilmu, 1984, cetakan II, hal.132.

⁴ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, cetakan I, hal.5.

1. Apa upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha terhadap pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan ?
2. Apa bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen atas pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh kecurangan pada timbangan makanan.
- b. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat selaku konsumen dalam membela hak-haknya terhadap masalah kecurangan timbangan berat bersih makanan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

2. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada konsumen yang mengalami kecurangan terhadap timbangan berat bersih timbangan makanan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Pengertian pelanggaran

Pengertian pelanggaran adalah segala perbuatan yang menyimpang dari aturan dan/atau hukum yang dapat merugikan orang lain atau dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dimana diatur menurut KUHPer Pasal 1365 yang menyatakan bahwa :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. “

Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :⁵

1. Melanggar hak-hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

1.5.2. Pengertian hak

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, cetakan VIII, hal.123.

Dalam hukum, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan, atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.⁶

1.5.3. Tinjauan mengenai konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dengan kata lain maka konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa.⁷ Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan.

Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama

⁶ Ibid, hal. 119.

⁷ ibid, hal 56.

orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.⁸

Namun dalam pengertian di masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit) lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum atau pada pokoknya langganan dari para pengusaha. Pengertian masyarakat ini tidaklah salah sebab secara yuridis dalam KUHPer terdapat subyek-subyek hukum dalam hukum perikatan yang bernama pembeli, penyewa, peminjam-pakai dsb.⁹

Konsumen dibagi menjadi 2 jenis yaitu :¹⁰

- a. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk di perdagangkan (tujuan komersial).
- b. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban-kewajiban konsumen dijelaskan yaitu untuk Membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan

⁸ Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal.80.

⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995, hal.68.

¹⁰ Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Sinar Grafika, 2008, cetakan I, hal.25.

barang dan/atau demi keselamatan serta membayar barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar. Dan kewajiban konsumen ini dipertegas dan diatur dalam UUPK Pasal 5 yang berbunyi :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Hak-hak Konsumen

Istilah Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.¹¹

Secara umum hak-hak konsumen banyak di sebutkan dalam beberapa buku dan juga diatur di dalam UUPK. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang sangat ingin hak-hak konsumen lebih mendapat perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hak-hak konsumen antara lain :¹²

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006, cetakan III, hal.19.

¹² Erman rajagukguk, et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, cetakan I, hal.39.

1. Hak keamanan dan keselamatan.

Setiap manusia menginginkan dirinya selalu dalam keadaan aman dan selamat, hukum salah satu tujuannya adalah memberikan keadaan tersebut. Dan berkaitan dengan kedudukan konsumen, maka oleh hukum diakui bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman dalam kegunaannya. Kosekuensi dari keberadaan hukum tersebut mewajibkan bahwa setiap barang dan/atau jasa yang beredar dan dimaksudkan untuk dikonsumsi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang.

2. Hak untuk mendapat informasi yang jujur.

Dengan adanya hak ini memberikan kedudukan kepada konsumen bahwa dirinya dalam menjalankan transaksi perlu diberikan informasi terlebih dahulu yang seluas-luasnya dan bersifat jujur agar tidak menyesatkan konsumen saat pemakaian.

3. Hak untuk memilih.

Manusia dengan kebebasannya maka dengan sendirinya memiliki hak untuk memilih, begitu pula saat berkedudukan sebagai konsumen hak tersebut tidak dapat dihilangkan. Dengan hak ini konsumen bisa memilih dan menentukan sendiri barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.

Hak untuk didengar keluhannya dalam peraturan perundang-undangan sekarang ini sudah cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Hak tersebut telah banyak terealisasi pada dunia perdagangan saat ini.

5. Hak atas lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak konsumen yang mulai dikembangkan akhir-akhir ini sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran manusia atas lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dengan adanya program-program untuk penghijauan, taman kota dll. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Hak-hak konsumen tersebut merupakan sebagian pecahan penjelasan yang dianut dari hak-hak konsumen yang ada didalam UUPK. Menurut Pasal 4 UUPK disebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-Hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5.4. Pengertian pelaku usaha

Pelaku usaha secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :¹³

a. Produsen

Produsen tidak punya hubungan langsung dengan para konsumen, ini dikarenakan produsen hanya bertugas membuat makanan yang akan dijual oleh penjual.

b. Penjual

Penjual disini mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, karena setiap harinya penjualah yang berhadapan langsung dengan para konsumen.

Disamping itu ada para kalangan ahli ekonomi (ikatan sarjana ekonomi indonesia) yang mengatakan bahwa pelaku usaha itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu :

¹³ Ratno Pamungkas, *Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Makanan dan Minuman yang Melanggar Label Halal*, Skripsi, fakultas hukum Universitas Erlangga, Surabaya, 2004, hal.21.

- a. Kelompok penyedia dana atau biasa disebut dengan investor. Investor disini untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen).
Contoh : Bank, koperasi atau lembaga penyedia dana lainnya.
- b. Kelompok pembuat barang (produsen) seperti pabrik atau industri rumah tangga.
- c. Kelompok pengedar barang, seperti warung, PKL, toko dll.

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) pengertian Pelaku usaha adalah :

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

- a. Kewajiban Pelaku usaha

Menurut Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi

5. dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
8. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Hak-hak Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha diatur didalam UUPK Pasal 6, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam UUPK Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, namun dalam kasus ini Pasal yang dilanggar pada khususnya tercantum pada Pasal 8 yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto. Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dan dalam kasus yang dibahas dalam masalah ini, pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 8 UUPK ayat (1) huruf b dan c yang pada intinya adalah ketidak tepatan isi berat bersih yang dicantumkan dengan kondisi barang sebenarnya.

d. Tanggung jawab pelaku usaha

Di dalam UUPK diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum di dalam Pasal 19 sampai Pasal 28, namun pada kasus ini khususnya berada dalam Pasal 19 yang berbunyi :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

1.5.5. Cacat Produk

Produk disebut probuk cacat, bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu

sebagaimana diharapkan orang, dengan mempertimbangkan berbagai keadaan yang ada, terutama tentang :¹⁴

- a. Penampilan produk.
- b. Kegunaan yang sepatutnya diharapkan dari produk.
- c. Saat produk tersebut diedarkan.

Berkenaan dengan masalah yang dibahas perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen atau *product liability*.

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab produsen (*product liability*) produk bukan hanya berupa *tangible goods* tapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti listrik, produk alami (misalnya Makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (misalnya Peta penerbangan yang diproduksi secara masal) atau perlengkapan tetap pada rumah *real estate* (misalnya Rumah).¹⁵

Pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi juga termasuk komponen dan suku cadang. Berkenaan dengan masalah cacat atau rusak dalam

¹⁴ Nasution, *konsumen dan hukum*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995, cetakan I, hal.173.

¹⁵ Erman rajagukguk, et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, cetakan I, hal.44.

pengertian produk yang cacat/rusak yang menyebabkan produsen harus bertanggung jawab, dikenal ada 3 jenis, yaitu :¹⁶

- a. suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.
- b. Bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari resikonya.
- c. Buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket, atau plakat tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman.

1.5.6. Tanggung Jawab Produk

Istilah *Product Liability* diterjemahkan secara bervariasi ke dalam bahasa Indonesia seperti “ Tanggung gugat produk ” atau juga “ Tanggung jawab produk “. Secara historis, *Product Liability* lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁷

Gugatan *Product Liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 hal (teori), yaitu :¹⁸

¹⁶ Ibid. hal.45.

¹⁷ Celina Tri siwi kristiyanti, *hukum perlindungan konsumen*, Malang, Sinar Grafika, 2008, cetakan I, hal.92.

¹⁸ Susanti adi nugroho, *proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, jakarta, prenada media group, 2008, cetakan I, hal.305.

a. Pelanggaran jaminan.

Pelanggaran jaminan ini berkaitan dengan jaminan pelaku usaha, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, atau barang yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat, dan ini dapat terjadi pada :

- 1). Konstruksi barang
- 2). Desain
- 3). Pelabelan

Pelanggaran jaminan ini juga termasuk salah satu faktor yang mendorong Ibu Fony selaku konsumen untuk melakukan pengaduan terhadap toko Hokky, karena ada salah satu unsur pelanggaran jaminan yang terpenuhi, yaitu pelabelan. Pelabelan dalam produk yang diperjual-belikan tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya.

b. Ada unsur kelalaian.

Adanya unsur kelalaian, manakala pelaku usaha yang digugat gagal menunjukkan bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. Dan dalam kasus pelanggaran oleh toko Hokky terhadap Ibu Fony, toko Hokky juga gagal membuktikan bahwa dia telah cukup berhati-hati dalam mendistribusikan barang dagangannya, sehingga pihak LPKS memenangkan pihak Konsumen.

- c. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, karena adanya perbuatan melawan hukum.

Kasus yang diangkat tentang kecurangan timbangan makanan dalam kemasan, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan teori penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Hal ini disebabkan dalam kasus timbangan tersebut mengandung adanya perbuatan melawan hukum. Sehingga mewajibkan pihak pelaku usaha untuk bertanggung jawab.

Tujuan utama dari penerapan tanggung jawab mutlak adalah untuk menjamin agar konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dibebankan pada orang atau pihak yang mempunyai tanggung jawab moral untuk menanggung kerugian tersebut.¹⁹

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam *product liability* adalah :²⁰

- a. Di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, risiko kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi barang-barang cacat/berbahaya di pasaran.
- b. Dengan mengedarkan barang-barang di pasaran, produsen menjamin bahwa barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab.

¹⁹ Ibid, hal. 307.

²⁰ Ibid

- c. Penerapan tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk menghilangkan proses penuntutan yang beruntun dan panjang.

Alasan-alasan inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya UUPK untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Adapun tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK diatur dalam BAB VI tentang tanggung jawab pelaku usaha pasal 19 sampai dengan pasal 28. sedangkan ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 28 UUPK.

Ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 19 UUPK, dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan :

“ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Ketentuan yang berkaitan dengan Pasal 23 UUPK tersebut adalah Pasal 28 UUPK yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pembuktian terhadap ada tidak adanya kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. “

Rumusan Pasal inilah yang kemudian dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik. Dalam permasalahan pertanggung jawaban produk, kita tidak selalu dapat menyalahkan kepada pihak pelaku

usaha, akan tetapi perlu dilihat dahulu siapa yang salah dan patut dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip tanggung jawab untuk dapat menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab tersebut.

1.5.7. Pengertian alat ukur timbangan

Pengertian alat ukur timbangan di dalam undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

1.5.8. Pengertian upaya hukum

a. Upaya hukum dalam UUPK

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Menurut pasal 19 jo pasal 23 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Menurut pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa :

” Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Menurut pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK menyatakan bahwa :

” Gugatan atas pelanggaran usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk perlindungan badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan

konsumen yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.”

b. Upaya Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya di singkat KUHPer)

Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Akan tetapi dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya pada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Dan pihak yang bersengketa tidak dapat main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan peraturan yang berlaku, apalagi pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutan secara damai dan minta bantuan penyelesaian kepada hakim. Dan cara penyelesaian kepada hakim tersebut diatur dalam hukum acara perdata.²¹

Dan untuk sengketa tentang pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan makanan ini, ketentuannya diatur dalam KUHPer pada Pasal-pasal berikut :

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2000, cetakan VII, hal.14.

Menurut Pasal 1328 KUHPer yang menyatakan bahwa :

” Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian. Apabila tipu muslihat yang di pakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

Menurut Pasal 1491 KUHPer yang menyatakan bahwa :

” Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin 2 hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”

c. Upaya hukum dalam Undang-undang nomor.2 tahun1981

Menurut Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

” Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai .

- a. nama barang dalam bungkusannya itu;
- b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
- c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

Jadi secara otomatis apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini maka pihak konsumen dapat menuntut kebenaran baik dengan melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

1.5.9. Bentuk sanksi-sanksi

a. Sanksi-sanksi menurut UUPK

Menurut UUPK sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal-pasal berikut ini :

1. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

”(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

2. Menurut Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

” pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

b. Sanksi-sanksi menurut KUHPer

Menurut Pasal 1365 yang menyatakan bahwa :

” Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

c. Sanksi-sanksi menurut KUHP

Menurut Pasal 383 yang menyatakan bahwa :

” Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli :

1e. Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli.

2e. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.”

d. Sanksi-sanksi menurut UU no.2 tahun 1981

Menurut Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

” (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian dan tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang metrologi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang permasalahan pelanggaran tentang pengurangan berat bersih timbangan makanan.

1.6.2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji adalah undang-undang perlindungan konsumen, Kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal, dan kitab undang-undang hukum pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum sebagai perangkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari :

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus bahasa Indonesia Balai Pustaka.

1.6.3. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi dengan membahas permasalahan tentang “ Pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan makanan. “

1.6.4. Metode pengumpulan data dan pengolahan data

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

1.6.5. Metode Analisis data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.6.6. Sistematika penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pokok bahasan, untuk memperoleh pembahasan atas permasalahan secara menyeluruh dan terperinci, berikut ini akan dijelaskan pembahasan dalam tiap babnya.

Dalam bab I adalah bab pendahuluan, di sini diuraikan tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian. Sehingga melalui isi dari bab I akan tampak alasan penyusun memilih obyek penulisan tentang “Pelanggaran hak-hak konsumen terhadap pengurangan berat bersih timbangan makanan”.

Sedangkan dalam bab II merupakan jawaban dalam permasalahan yang pertama. Penyusun akan membahas tentang Upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha terhadap pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan makanan. Dimana penyelesaiannya dapat melalui di luar Pengadilan (non Litigasi) atau melalui Pengadilan Umum (Litigasi).

Kemudian dalam bab III penyusun akan membahas tentang permasalahan yang kedua yaitu Pertanggung Jawaban apakah yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen atas pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan

makanan. Dimana kerugian tersebut terjadi karena produk tersebut termasuk produk cacat dalam lingkup pelabelan yang tidak benar ataupun karena adanya unsur perbuatan melanggar hukum serta prinsip tanggung jawab yang bagaimanakah yang dapat diterapkan.

Dan terakhir dalam bab IV merupakan bab penutup dimana penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan atas semua jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam bab II dan bab III. Selain itu penyusun akan memberikan saran yang bermanfaat bagi perlindungan hak-hak konsumen terhadap pengurangan berat bersih timbangan makanan.

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya yang berperan untuk mendorong terciptanya interaksi masyarakat secara sehat dan saling menguntungkan bagi setiap komponen inti di dalamnya, yaitu konsumen para pelaku usaha industri perdagangan dan jasa, serta pemerintahan, tidak seperti yang terjadi sekarang ini dimana pihak pelaku usaha selalu diuntungkan dan konsumen selalu merasa dirugikan, serta Lembaga tersebut merupakan suatu wadah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan konsumen sehingga memudahkan penyusun untuk mencari data guna melengkapi data dalam skripsi ini.